

## **Bimbingan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Bidang Kearsipan: Tinjauan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)**

**Mutiara Auliya Khadija\*, Ida Setya Dwi Jayanti, Hanum Kartika Sari, dan  
Fahmi Ulin Ni'mah**

Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

\*[mutiaraauliya@staff.uns.ac.id](mailto:mutiaraauliya@staff.uns.ac.id)

**Abstrak:** Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) merupakan perwujudan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dalam hal kearsipan. Hal ini juga didukung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PermenPANRB) yang menempatkan kualitas kearsipan sebagai salah satu indikator pelaksanaan reformasi birokrasi. Kearsipan digital berbasis SPBE berkontribusi secara aktif terhadap transparansi birokrasi karena berbasis teknologi dan bukan manual. Di sisi lain, Pemerintah Kota Surakarta juga telah menerapkan SRIKANDI sejak tahun 2021 dan masih diperlukan bimbingan tinjauan tentang bagaimana tata kelola SPBE bidang kearsipan baik dari sisi evaluasi sistem, persepsi dan juga tingkat kesiapan pengguna. Bimbingan diberikan kepada perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Surakarta khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Sekretariat Daerah dan juga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Adapun metode yang digunakan yaitu *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Metode ini didasarkan pada metode partisipatif, dan digunakan untuk mengevaluasi partisipasi pemangku kepentingan dalam proses penilaian suatu kegiatan. Metode ini aktif secara langsung berinteraksi dengan stakeholder untuk mendapatkan tujuan yang diharapkan. Hasil dari bimbingan ini yaitu para OPD menjadi paham bagaimana SRIKANDI sebagai bagian dari tata kelola SPBE bidang kearsipan ditinjau evaluasi sistem, persepsi dan juga tingkat kesiapan pengguna. Sehingga, pelaksanaan reformasi birokrasi bidang kearsipan di Pemerintah Kota Surakarta menjadi lebih maksimal.

**Kata Kunci:** bimbingan tata kelola SPBE; kearsipan; SRIKANDI

**Abstract:** *The Integrated Dynamic Records Information System (SRIKANDI) is a manifestation of the Electronic-Based Government System (SPBE) by the National Records of the Republic of Indonesia (ANRI) in order to realize clean, effective, transparent, and accountable governance as well as quality and reliable public services in terms of archives. This is also supported by PermenPANRB which places the quality of archives as one of the indicators of the implementation of bureaucratic reform. On the other hand, the Surakarta City Government has also implemented SRIKANDI since 2021 and a review guidance is still needed on how to manage SPBE in the field of records in terms of system evaluation, perception and also the level of readiness of its users. Guidance was given to representatives of OPDs in the Surakarta City Government, especially Dispersip, Diskominfo, Regional Secretariat and also Bappeda on May 17, 2023. The method used is*

*Participatory Rural Appraisal (PRA) which aims to evaluate stakeholder participation in the assessment process. This method is based on participatory methods, and is used to evaluate stakeholder participation in the assessment process of an activity. The result of this guidance is that OPDs understand how SRIKANDI as part of SPBE governance in the field of records management is reviewed by system evaluation, perception and also the level of user readiness. So that the implementation of bureaucratic reform in the field of archives in the Surakarta City Government will be maximized.*

**Keywords:** SPBE governance guidance; records management; SRIKANDI

© 2024 Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat

**Received:** 9 Agustus 2023

**Accepted:** 24 Desember 2023

**Published:** 3 Januari 2024

**DOI:** <https://doi.org/10.20527/btjpm.v6i1.9812>

**How to cite:** Khadija, M. A., Jayanti, I. S. D., Sari, H. K., & Ni'mah, F. U. (2024). Bimbingan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) bidang kearsipan: tinjauan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI). *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 28-35.

## PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan saat ini dilaksanakan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah berupaya untuk terus berinovasi menyelenggarakan kegiatan pemerintahan secara digitalisasi untuk mewujudkan *Smart City* khususnya pada dimensi *Smart Governance*. *Smart Governance* adalah pendekatan pemerintahan yang berfokus pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks smart city, smart governance mengacu pada penggunaan teknologi dan data untuk mengelola kota dengan cara yang lebih cerdas dan responsif terhadap kebutuhan warga (Wicaksono et al., 2021). Kota Surakarta yang merupakan salah satu kota besar di Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu melaksanakan kegiatan pemerintahan secara optimal. Pemanfaatan teknologi tepat guna dapat membantu pelaksanaan pekerjaan. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu upaya digitalisasi yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Salah satu sistem yang digunakan untuk penyelenggaraan SPBE di Pemerintahan

Kota Surakarta adalah Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) (Farikha, 2019). Adanya perkembangan teknologi secara digital juga dapat mempermudah pengelolaan data atau dokumen. Sehingga bisa dimanfaatkan dalam membantu penyelenggaraan perencanaan pembangunan, membantu pengambilan keputusan dan manfaat lainnya (Yasa et al., 2021).

Pada pelaksanaannya, penggunaan SRIKANDI untuk pengelolaan kearsipan pada Pemerintah Kota Surakarta sudah berjalan selama 2 tahun. Sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surakarta sudah menggunakan aplikasi SRIKANDI. Mempermudah pengelolaan surat atau dokumen masuk dan keluar, berkas atau arsip yang dijaga siklus hidupnya. Dimulai dari penciptaan dokumen, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan (Yunda et al., 2022). Namun, keberjalanan penggunaan sistem informasi ini memerlukan perbaikan agar dapat berfungsi secara optimal membantu penyelenggaraan pemerintahan. Perlu adanya evaluasi mengenai keberjalanan sistem untuk mengetahui apakah terdapat hambatan dalam penerapan sistem informasi SRIKANDI tersebut.

Pengguna aplikasi SRIKANDI saat ini merupakan pegawai sektor pemerintahan dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan pemerintahan kota. Pada keberjalanannya, pasti terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pengguna aplikasi SRIKANDI. Dikarenakan aplikasi SRIKANDI sendiri masih memerlukan perbaikan sistem agar berfungsi lebih optimal. Selain terdapat evaluasi dari sistem aplikasi sendiri, juga terdapat evaluasi dari sumber daya manusia. Inovasi dari hasil evaluasi aplikasi SRIKANDI diharapkan bisa menjadi solusi yang dapat diedukasikan secara menyeluruh ke semua lapisan masyarakat disertai kesiapan pemerintah untuk mewujudkan perkembangan di era digitalisasi.

Evaluasi keberjalanan penggunaan aplikasi SRIKANDI pada sektor pemerintahan dapat dilihat dari sudut pandang masyarakat umum hingga pengguna aplikasi ini sendiri yaitu pegawai pemerintahan (Didik Madyatmadja et al., 2018). Terdapat permasalahan dari aspek sistem dan sumber daya manusia. Kendala yang ada pada sistem adalah masih adanya *bug* pada aplikasi sehingga perlu adanya penyesuaian untuk penggunaan aplikasi ke depannya. Sistem yang lambat juga menjadi salah satu permasalahan pada SRIKANDI.

Permasalahan lain yang menjadi persepsi masyarakat dan sorotan pada sumber daya manusia. Kesiapan pengguna aplikasi SRIKANDI di setiap OPD Pemerintah Kota Surakarta sangat berpengaruh pada efektivitas sistem informasi terintegrasi ini. Terpenuhinya sumber daya manusia yang mumpuni dalam memanfaatkan aplikasi ini dapat membantu optimalisasi aplikasi SRIKANDI di sektor pemerintahan. Perlu adanya dukungan pimpinan dalam mengatur regulasi dan kebijakan untuk manajemen sumber daya manusia yang lebih baik untuk mengelola dan menggunakan aplikasi ini. Peran

pimpinan yang berpengaruh besar untuk kebijakan setiap penyelenggaraan kegiatan di OPD termasuk pada penggunaan SRIKANDI dalam membantu pengelolaan arsip. Persebaran informasi mengenai penggunaan aplikasi ini juga menjadi salah satu hambatan dalam pemanfaatan aplikasi ini di Pemerintah Kota Surakarta. Dikarenakan kurangnya tutorial resmi yang didapat dari ANRI baik berupa video maupun teks yang bisa dijangkau secara mudah. Tutorial yang mudah dijangkau secara online seperti di *platform YouTube* juga masih minim. Tutorial hanya sebatas informasi umum yang belum bisa terinci dengan baik.

Berdasarkan evaluasi dan persepsi pengguna tersebut, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat membantu memberikan perbaikan pada aplikasi SRIKANDI. Dengan berkolaborasi bersama pihak terkait untuk turut menilai keberjalanan aplikasi ini. Sehingga aplikasi SRIKANDI lebih optimal membantu pengolahan arsip secara digital dan memudahkan pekerjaan. Lalu bimbingan dan pendampingan penggunaan SRIKANDI dapat memberikan penjelasan yang mudah dimengerti pengguna aplikasi SRIKANDI pada OPD Pemerintah Kota Surakarta.

## **METODE**

Pihak yang berkontribusi dalam pengabdian ini terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Surakarta. Sasaran kegiatan pengabdian dengan melibatkan peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surakarta, serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta. OPD akan membantu dalam melakukan analisis kebutuhan dan pengumpulan informasi. OPD akan aktif

terlibat dalam semua hal perbaikan sistem informasi dan mendapatkan bimbingan dan pendampingan dalam mengelola sistem informasi.

Secara teori, pengabdian masyarakat ini menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Metode ini merupakan pendekatan yang mengajak *stakeholder* untuk ikut berpartisipasi dalam proses membangun dan mengembangkan suatu kegiatan. Memanfaatkan keterlibatan masyarakat untuk membangun dengan adanya kritik bahwa *stakeholder* hanya diperlakukan sebagai objek, tidak sebagai subjek (Khoryanton et al., 2021).

Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) merupakan metode penelitian yang dikembangkan untuk meningkatkan partisipasi *stakeholder* pada pembangunan. Dengan metode ini pegawai atau pengguna dapat mengungkapkan dan menganalisis situasi mereka sendiri serta merencanakan pembangunan daerah secara optimal. (Hudayana et al., 2019). Dalam pelaksanaannya, metode ini digunakan mulai dari tahap analisis kebutuhan lalu analisis GAP, hingga tahap pelaksanaan bimbingan dan pendampingan seperti yang tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1 Tahapan kegiatan pengabdian

Analisis kebutuhan dan analisis GAP dilakukan dengan survei, wawancara dan FGD. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di wilayah Pemerintahan Kota Surakarta. Sasaran

kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat melibatkan OPD Pemerintah Kota Surakarta dari Diskominfo, Dispersip, Sekretariat Daerah dan juga Bappeda. Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada bulan Mei. Dalam pelaksanaannya, program pengabdian kepada masyarakat ini mengaplikasikan pendekatan untuk melakukan bimbingan dengan mentransfer pengetahuan dan teknologi dari institusi Perguruan Tinggi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dengan fokus khusus pada panduan untuk berbagai OPD. Pendekatan ini dirancang untuk membimbing OPD dalam melakukan evaluasi komprehensif terhadap Sistem Informasi Kearsipan Elektronik SRIKANDI, dengan mempertimbangkan pandangan masyarakat, kinerja sistem, dan kesiapan internal OPD (Landsbergen et al., 2022).

Strategi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini memanfaatkan metode transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari lingkungan Perguruan Tinggi ke para pihak yang berkepentingan, terutama dengan tujuan memberikan panduan kepada berbagai OPD. Panduan ini difokuskan pada mendampingi OPD dalam melaksanakan proses evaluasi holistik terhadap Sistem Informasi Kearsipan Elektronik SRIKANDI, yang mencakup tinjauan atas pandangan masyarakat terhadap sistem, performa keseluruhan sistem, dan kesiapan internal OPD..

### Analisis Kebutuhan

Pada tahap analisis kebutuhan menjadi sarana untuk menentukan apa saja yang dibutuhkan. Kegiatan ini akan diawali dengan melakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan informasi mengenai aplikasi SRIKANDI pada kegiatan pemerintahan Kota Surakarta. Pertemuan tim pengabdian dengan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surakarta yang menjadi pihak terkait pembangunan aplikasi SRIKANDI. Keteraturan di segala aspek

pada sistem yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan diwajibkan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan administrasi publik (Rinjani & Prehanto, 2021). Setelah itu menganalisis permasalahan yang dihadapi selama penggunaan aplikasi, komponen yang perlu diperbaiki dalam sistem, apa saja fitur-fitur yang dapat ditambahkan atau dievaluasi.

### **Analisis GAP**

Analisis GAP atau analisis kesenjangan ini bertujuan untuk mengetahui komponen sistem dalam aplikasi yang perlu ditingkatkan dan dipertahankan kinerjanya (Setiawan & Sisilia, 2020). Mengukur perbedaan antara data yang didapat dari informasi kebutuhan dan fakta yang ada di lapangan.

### **Bimbingan dan Pendampingan Kepada OPD Pemerintah Kota Surakarta**

Setelah data terkumpul dan sudah dilakukan analisis, tim pengabdian akan melaksanakan bimbingan dan pendampingan kepada OPD terkait pemanfaatan aplikasi SRIKANDI secara optimal. Tim pengabdian akan mendampingi pengguna atau petugas yang mengoperasikan aplikasi SRIKANDI di OPD Pemerintah Kota Surakarta.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai sejak bulan Februari hingga bulan Mei dengan melakukan koordinasi awal mengenai kebutuhan data dan informasi aplikasi SRIKANDI pada Pemerintah Kota Surakarta. Koordinasi awal bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta dengan menghimpun informasi mengenai sistem informasi terintegrasi kearsipan SRIKANDI. Dihadiri oleh perwakilan pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk menjelaskan beberapa informasi kebutuhan

pengabdian. Kegiatan tersebut menghasilkan suatu analisis kebutuhan untuk kegiatan pengabdian. Informasi mengenai penggunaan aplikasi SRIKANDI pada OPD Pemerintah Kota Surakarta. Kehadiran aplikasi Srikandi sebagai salah satu sistem pemerintahan yang berbasis elektronik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas.

Pemerintah berkomitmen selalu memberikan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran digitalisasi pemerintahan yang baik akan memberikan dampak peningkatan kepuasan masyarakat kepada sektor pemerintahan (Arif et al., 2022; Arifah, 2022; Hendriyadi & Musnaini, 2021; Karim et al., 2020; Santoso & Rahmadanita, 2020). SRIKANDI dihadirkan oleh ANRI sebagai fasilitas digitalisasi kegiatan pemerintahan pada bidang kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta menjadi garda terdepan dalam penerapan aplikasi ini dalam pengelolaan arsip pada setiap kegiatan pemerintahan. Menyalurkan informasi dari ANRI mengenai setiap perubahan dan turut membantu OPD apabila terdapat kesulitan dalam menggunakan sistem ini. Kegiatan tim peneliti dalam melakukan bimbingan tata kelola SPBE SRIKANDI dengan menunjukkan analisis kebutuhan dan juga permasalahan yang dialami selama keberjalanan penggunaan aplikasi SRIKANDI di OPD Pemerintah Kota Surakarta seperti pada Gambar 2.



Gambar 2 Pelaksanaan bimbingan tata kelola SPBE SRIKANDI

Kerjasama dan partisipasi dari setiap OPD menjadi salah satu aspek utama yang ditekankan oleh pendekatan PRA yang diterapkan oleh tim pengabdian. Metode ini memusatkan perhatian pada berbagai strategi kerja sama yang dapat diterapkan dalam konteks analisis Sistem Informasi Kearsipan SRIKANDI. Dalam rangka mencapai tujuan ini, metode PRA memanfaatkan dua pendekatan penting, yaitu analisis kebutuhan dan analisis gap.

Pendekatan pertama yang digunakan adalah analisis kebutuhan. Melalui analisis ini, tujuan utamanya adalah untuk memahami persepsi dan pemahaman para pegawai terkait dengan sistem SPBE yang diterapkan dalam proyek SRIKANDI. Dengan demikian, tim pengabdian dapat mengukur sejauh mana tingkat penerimaan dan penggunaan sistem ini. Selain itu, analisis kebutuhan juga bertujuan untuk menggali informasi mengenai kondisi aktual sistem SPBE di lapangan, termasuk kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan arsip elektronik tersebut.

Pendekatan kedua yang diterapkan adalah analisis gap. Pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi perbedaan antara kondisi aktual di lapangan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan membandingkan fakta-fakta yang ada dengan target yang ditetapkan, tim pengabdian dapat menentukan kesenjangan atau hambatan yang perlu diatasi dalam rangka mencapai kesuksesan implementasi sistem. Dengan kata lain, analisis gap memberikan pandangan mendalam tentang tantangan yang dihadapi dalam menjalankan sistem SPBE dan mengelola arsip secara efektif dalam lingkungan OPD.

Secara keseluruhan, melalui pendekatan PRA, tim pengabdian berupaya untuk membangun kerja sama yang kuat antara OPD serta memastikan partisipasi aktif dari semua pihak terkait. Dengan menggabungkan analisis

kebutuhan dan analisis gap, tim pengabdian berharap dapat merumuskan rekomendasi dan strategi yang lebih tepat guna dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem informasi kearsipan SRIKANDI, serta mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama proses implementasi dan pengelolaan.

Menurut data dan informasi yang dihimpun oleh tim pengabdian, respon pengguna melalui media sosial ataupun yang disampaikan secara langsung melalui pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta cukup memberikan respon yang baik. Hal tersebut menandakan kehadiran aplikasi SRIKANDI dalam membantu pengelolaan arsip pada sektor pemerintahan memberikan dampak yang positif. Berbagai pihak menuturkan bahwa aplikasi SRIKANDI mempermudah pengelolaan surat dan arsip pada pekerjaannya. Namun juga ada yang menuturkan bahwa fitur yang ada pada aplikasi SRIKANDI belum sepenuhnya cocok apabila digunakan pada OPD tertentu. Lalu juga minimnya tutorial resmi dari ANRI untuk pengelolaan arsip yang maksimal pada aplikasi SRIKANDI. Apabila ada hal yang kurang dimengerti mengenai penggunaan aplikasi SRIKANDI hanya dapat bertanya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Tutorial penggunaan aplikasi SRIKANDI sebenarnya sudah ada pada *YouTube*, namun bukanlah tutorial resmi. Tutorial yang tersedia juga hanya sebatas pengelolaan umum, sehingga kurang lengkap apabila ingin mendapatkan informasi pengelolaan arsip secara optimal pada SRIKANDI. Inovasi yang dihadirkan untuk kemajuan aplikasi SRIKANDI dengan memberikan solusi yang bisa diedukasikan secara menyeluruh ke semua lapisan masyarakat disertai kesiapan pemerintah.

Perbaikan sistem aplikasi yang masih mengalami kendala *bug* dapat dikoordinasikan dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika untuk

memperbaiki sistem menjadi lebih baik. Dikarenakan SRIKANDI merupakan aplikasi umum yang sudah ditetapkan, maka tidak boleh ada aplikasi sejenis yang dikembangkan. Perlu adanya pembenahan dan penyesuaian sistem informasi agar tidak terjadi kendala sistem seperti lambat ataupun *bug*. Selain itu, faktor pelaksanaan proses bisnis di setiap instansi yang berbeda menjadi kendala penerapan aplikasi ini pada OPD Pemerintah Kota Surakarta. Perlu adanya penyesuaian agar dapat mencakup kegiatan proses bisnis masing-masing instansi.

Permasalahan lain yang ada pada penerapan SRIKANDI untuk kegiatan pemerintahan adalah sumber daya manusia pengguna. Kendala tersebut bisa diatasi dengan praktik beberapa OPD di sini apakah benar kewenangan atau pimpinan itu setuju mengenai SRIKANDI atau belum. Melakukan analisis tingkat kesiapan pengguna atau SDM yang ada harus dirapikan sehingga aplikasi dapat dimanfaatkan secara optimal. Pengguna SRIKANDI di Kota Surakarta ini memang harus diberikan bimbingan khusus lagi karena belum sampai kita pemberkasan. Padahal menu pada aplikasi sudah ada pemberkasan. Apabila dokumen sudah diberkaskan sudah ada peringatan dipindahkan atau musnah atau yang permanen.

Kendala SDM pengelola arsip atau pengelola SRIKANDI yang sudah menerima bimtek, pada 1 atau 2 bulan dipindahkan oleh atasannya ke tempat yang lain. Hal ini yang membuat bimtek tidak berperan secara maksimal dalam persebaran informasi. Perlunya regulasi pemerintah mengenai proses rotasi dan mutasi SDM pengelola SRIKANDI setiap OPD ini siapa yang pegang akunnya dan lain sebagainya. Ketika terdapat SK Pimpinan untuk mengelola SRIKANDI maka pihak ditunjuk akan bertanggungjawab penuh. Para perwakilan OPD mengutarakan

bagaimana SRIKANDI di lapangan terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3 Bimbingan aplikasi SRIKANDI ke OPD

### SIMPULAN

Aplikasi SRIKANDI dibuat oleh pihak ANRI bersama KOMINFO untuk membantu pelaksanaan kegiatan pemerintahan secara digital. Dalam perkembangannya, dibutuhkan perbaikan sistem dalam aplikasi SRIKANDI agar tidak terjadi server yang lambat dan *bug* dalam pemakaiannya. Juga terdapat kendala dalam pengguna aplikasi atau SDM pengelola dalam melakukan pemberkasan. Kendala tersebut dapat dibantu diatasi dengan regulasi pimpinan yang mengatur pengelola aplikasi dan penyaluran informasi hingga bimbingan secara teknis pemanfaatan aplikasi SRIKANDI pada sektor Pemerintah. Bimbingan dan pelatihan yang diselenggarakan dapat meningkatkan kesiapan pengguna. Sehingga dengan adanya perbaikan sistem dan peningkatan kualitas SDM dapat mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan arsip pada pemerintahan. Dampak yang terjadi setelah adanya bimbingan dan pelatihan adalah pengguna menjadi lebih siap dengan fitur-fitur yang ada di SRIKANDI. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu mengaplikasikan SRIKANDI ke berbagai OPD untuk semua urusan terkait dengan kearsipan.

### DAFTAR PUSTAKA

Arif, Z. K. L., Putri, N. A., Rahmadhanti, R. A., Pitaloka, S. D., & Putri, D. M. (2022, November). Digitalisasi

- akuntansi berbasis techtrend sebagai upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2(6).
- Arifah, S. Z. (2022). Strategi penerapan good governance pada pemerintahan kota makassar. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 84-95.
- Didik Madyatmadja, E., Abdurachman, E., Gaol, F. L., Pudjianto, B. W., & Hapsara, M. (2018). Potential Impact of Social Media to support government services in jakarta smart city. *2018 International Conference on Information Management and Technology (ICIMTech)*, 534–538.
- Farikha, M. (2019). Implementation of smart governance concept policy in bantul regency. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), Article 2.
- Hendriyaldi, H., & Musnaini, M. (2021). Analisis pengaruh pelayanan publik dan e-service quality terhadap kepuasan masyarakat di lingkungan pemerintahan kota jambi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 10(01), 87-98.
- Hidayana, B., Kutanegara, P. made, Setiadi, S., Indiyanto, A., Fauzanafi, Z., Nugraheni, M. D. F., Sushartami, W., & Yusuf, M. (2019). Participatory rural appraisal (pra) untuk pengembangan desa wisata di pedukuhan pucung, desa wukirsari, bantul. *Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 99-112.
- Karim, N., Hendriyaldi, H., & Rohayati, W. (2020). Analisis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan melalui E-Service Quality di kota Jambi. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 135-150.
- Khoryanton, A., Pratikto, P., Suparman, S., & Santoso, P. B. (2021). Participatory rural appraisal strategy in realizing the standardization of ship components. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1108(1), 012048.
- Landsbergen, D., Girth, A., & Westover-Muñoz, A. (2022). Governance rules for managing smart city information. *Urban Governance*, 2, 221-231.
- Rinjani, A. D. A., & Prehanto, D. R. (2021). Analisis kepuasan pengguna aplikasi bibit reksadana menggunakan metode eucs dan ipa. *Jutisi : Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 10(2), 123-136.
- Santoso, E. B., & Rahmadanita, A. (2020). Smart government dalam rangka mewujudkan smart city di kota bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(2), 317-334.
- Setiawan, R., & Sisilia, K. (2020). Analisis profil konsumen untuk pengembangan aplikasi futsal menggunakan pendekatan desain proposisi nilai. *Jurnal EMBA*, 8(1), 62-74.
- Wicaksono, B., Asta, R., & Rafi, M. (2021). Perbandingan kebijakan dimensi smart people dalam perwujudan smart city di kota metropolitan: dimension policy of smart people in metropolitan city of bandung, jakarta, and pekanbaru. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 13(1), 93-103.
- Yasa, A., Suswanta, S., Rafi, M., Rahmanto, F., Setiawan, D., & Iqbal Fadhlorrohman, M. (2021). Penguatan reformasi birokrasi menuju era society 5.0 di indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 27–42.
- Yunda, N. R., Sukaesih, S., & Prahajmaja, N. (2022). Pengelolaan arsip dinamis dalam menunjang tertib administrasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung. *Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(7), 638–648.